



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN PASER  
**UNIT KERJA** : KECAMATAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : RUSDIANSYAH
2. Jabatan : SEKRETARIS CAMAT
3. NHK : 504730

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.785.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 189 m2/120 m2 di KOTA SAMARINDA , HADIAH Rp. 1.250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 405 m2/110 m2 di PASER, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
3. Tanah Seluas 660 m2 di PASER, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
4. Tanah Seluas 39200 m2 di PASER, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 386 m2/102 m2 di PASER, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
6. Tanah Seluas 2500 m2 di PASER, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
7. Tanah Seluas 650 m2 di PASER, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 120.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA FIT Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
5. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000



6. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.  
17.500.000

<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	<b>238.090.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	---
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	<b>34.319.799</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	---
<b>Sub Total</b>	Rp.	<b>3.177.409.799</b>
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	---
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	<b>3.177.409.799</b>

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.